



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 16 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : RINA DEWIYANTI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 264902

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 8.455.000.000

1. Tanah Seluas 7171 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 200.000.000
2. Tanah Seluas 2877 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HIBAH TANPA AKTA Rp. 100.000.000
3. Tanah Seluas 703 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
4. Tanah Seluas 820 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 50.000.000
5. Tanah Seluas 554 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 40.000.000
6. Tanah Seluas 14000 m2 di KAB / KOTA KOTA BANJAR , WARISAN Rp. 110.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 2850 m2/150 m2 di KAB / KOTA CIAMIS, HASIL SENDIRI Rp. 760.000.000
8. Tanah Seluas 1982 m2 di KAB / KOTA TASIKMALAYA, HASIL SENDIRI Rp. 2.750.000.000
9. Tanah Seluas 1590 m2 di KAB / KOTA KOTA TASIKMALAYA , HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
10. Tanah Seluas 15551 m2 di KAB / KOTA LEBAK, HASIL SENDIRI Rp. 250.000.000
11. Tanah dan Bangunan Seluas 3680 m2/48 m2 di KAB / KOTA PANDEGLANG, HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
12. Tanah dan Bangunan Seluas 637 m2/415 m2 di KAB / KOTA KOTA



SERANG, HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. ----

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 12.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 314.807.183

F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 8.782.307.183

III. HUTANG

Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 8.782.307.183

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.